



JURNAL

ANTI KORUPSI

- **Korupsi Dan Money Laundering**
Ainul Azizah, SH, MH
- **Kejahatan Korupsi Dalam Perspektif Kriminologi**
Halif, SH, MH
- **Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 *Juncto* UU No. 20 Tahun 2001**
Samsudi, SH, MH
- **Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dan Permasalahannya**
Dwi Endah Nurhayati, SH, MH
- **Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**
Dodik Prihatin AN, SH, MHum
- **Korupsi Dan Ekonomi: Ampuhkah Modal Sosial Negara Memerangi Korupsi?**
Aditya Wardono, SE, MSc, PhD
- **Problematika Penerapan Sistem Keperdataan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Suatu Tinjauan Dan Telaah Yuridis Terhadap UU Tindak Pidana Korupsi)**
Dr. Fendi Setyawan, SH, MH
- **Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi**
Laely Wulandari, SH, MH

Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Jember

Jurnal
Anti Korupsi

Vol. 01

No. 1

Hal. 1 - 122

Jember
Mei 2011

ISSN
2088-3161

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	ii
Pengantar Redaksi.....	iii
Korupsi dan Money Laundering	
Ainul Azizah, S.H., M.H.....	1-14
Kejahatan Korupsi Dalam Perspektif Kriminologi	
Halif, S.H., M.H.....	15-31
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 <i>Juncto</i> UU No. 20 Tahun 2001	
Samsudi, S.H., M.H.....	33-44
Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Permasalahannya	
Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.....	45-57
Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	
Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum.....	59-77
Korupsi dan Ekonomi: Ampuhkah Modal Sosial Negara Memerangi Korupsi?	
Aditya Wardono, S.E., M.Sc., PhD.....	79-91
Problematika Penerapan Sistem Keperdataan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Suatu Tinjauan dan Telaah Yuridis Terhadap UU Tindak Pidana Korupsi)	
Dr. Fendy Setyawan, S.H., M.H.....	93-107
Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi	
Laely Wulandari, S.H., M.H.....	109-111
Biodata Penulis.....	121
Petunjuk Penulisan.....	122

KORUPSI DAN EKONOMI: AMPUHKAH MODAL SOSIAL NEGARA MEMERANGI KORUPSI?

Oleh: Adhitya Wardhono
Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan,
Fakultas Ekonomi - Universitas Jember.

Abstrak

Kenyataan bahwa korupsi adalah penyakit kronis ekonomi dan sosial bagi Indonesia adalah fakta yang tidak terelakkan. Tindak korupsi tidak saja dilakukan oleh aparat negara dan pelaku bisnis, namun fenomena yang semakin jamak dalam masyarakat. Pijakan teoritis ekonom terkait korupsi sering kali cenderung pada dua bangunan pemikiran yaitu teori perburuan rente (*rent-seeking*) dan teori atasan-bawahan (*principal-agent*). Teori ini melihat relasi antara dua pihak dengan tujuan serta insentif berbeda yang terjadi dalam situasi asimetris. Sementara kajian empiris ekonomi membawa pada dua pandangan yaitu bahwa korupsi dapat menjadi pelancar urusan birokrasi dan pada sisi yang lain korupsi membawa konsekuensi investasi domestik menjadi berkurang, menurunkan investasi asing, *bubbles* (menggelembungkan) pengeluaran pemerintah dan mendistorsi komposisi pengeluarannya untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, sehingga preferensi masyarakat yang tercermin dari jasa publik yang diinginkan tidak terpenuhi. Memberantas korupsi dengan menghadirkan kesadaran kolektif yang melibatkan negara melalui reformasi sosial perbaikan modal sosial negara dengan menghadirkan *an affective developmental state* mutlak diperlukan. Peran negara dan modal sosial dalam memupus praktek korupsi yang diinisiasi dalam kebijakan publik yang merupakan proses reflektif yang menyeluruh demi rakyat, maka hal ini akan terjadi dengan satu syarat bahwa kredibilitas pemerintah harus dilevel yang memadai.

Kata kunci: Korupsi, teoritis dan empiris, ekonomi, modal sosial negara.

I. Pendahuluan

Secara serempak tepat tiap tanggal 9 Desember peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia diperingati oleh masyarakat dunia sebagai titik kontemplasi hidup untuk peduli pada praktik ketidakadilan yang terjadi dan bagaimana hidup lebih harmoni. Maka tidak berlebihan juga bagi bangsa Indonesia peringatan yang memiliki arti penting dalam upaya mengeliminasi praktek-praktek korupsi yang telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi tantangan yang dihadapi kian berat. Tindak korupsi di Indonesia telah "berdiaspora" demikian rupa, merebak di ranah peradilan, kepolisian, militer, DPR, lembaga pemerintahan, BUMN, BUMD, institusi sosial, LSM dan swasta. Sehingga konon membicarakan masalah korupsi bagai kasus pornografi yang memunculkan jargon "*you know it when you see it*". Meski elemen masyarakat dan pengamat dan bahkan pemerintah dengan lantang sudah menginginkan kejahatan korupsi segera dihentikan, namun demikian hingga saat ini masih saja sulit

diberantas - *bagai menjaring angin* – mungkin itu kegeraman banyak pihak atas masalah ini.

Jamaknya korupsi berakar dari manusia yang bersifat *selfish* atau mengutamakan diri sendiri. Dan *selfish* biasanya awal memunculnya sifat *greed* (serakah). Pada titik ini korupsi akan terjadi jika dua hal terjadi secara bersamaan, yaitu persinggungan antara *willingness to corrupt* yang sifatnya internal dengan *opportunity to corrupt* yang sifatnya eksternal. Pada posisi manusia sebagai makhluk ekonomi maka momentum korupsi akan terjadi dengan sangat “sederhana” prosesnya karena galibnya hampir semua manusia memiliki sifat serakah dan pasti berupaya untuk *utility maximization*, yaitu memaksimalkan manfaat dengan biaya yang seminimal mungkin.

Beranjak dari gambaran di atas, tulisan berikut tidak semata-mata mencoba menyoroti maraknya korupsi di Indonesia secara berlebihan, namun lebih mencermati korupsi dari sudut pandang ekonomi, khususnya dampak korupsi terhadap perekonomian dari aspek teoritik maupun bukti empirik. Bagian akhir akan dipaparkan suatu paradigma modal sosial untuk ditautkan dengan paradigma ekonomi, suatu alternatif paradigma yang dihipotesiskan mampu untuk menekan laju korupsi di Indonesia.

II. Sekilas Ekonomi Korupsi: Paparan Teoritik dan Fakta Empirik

Dewasa ini dapat dikatakan kajian korupsi mengalami kebingungan pemahaman baik yang bersifat struktural maupun konseptual. Perilaku korupsi selalu dialamatkan pada aparat negara, meskipun kenyataan ini tidak seratus persen benar (Shleifer, A., and R.W. Vishny, 1993). Pelaku bisnis pun sangat sarat dengan kasus korupsi. Namun demikian citra negara demikian terpuruknya dengan kasus korupsi yang dilakukan aparatnya. Hal ini sesuatu yang sangat masuk akal dan bahkan menjadi barometer layak tidaknya suatu kegiatan ekonomi berlangsung dalam suatu negara. Banyak versi yang mengukur kaitan tindak korupsi dengan ekonomi yang dapat menjadi cermin hal tersebut, semisal: *Business International Index (BI)*, *International Country Risk Guide Index (ICRG)*, *Global Competitiveness Report Index (GCR)*. Dua indeks yang sering menjadi rujukan adalah Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*), disusun oleh Johann Graf Lambsdorff (Lambsdorff, 2007) dipublikasikan oleh *Transparency International* seringkali disebut sebagai ‘Indeks TI.’

menurunkan tingkat korupsi hingga level Singapura, maka akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,25 persen. Jadi apabila pada tahun 1980-1983, perekonomian Indonesia secara riil tumbuh sebesar 5 persen, maka apabila korupsi bisa dikontrol maka pertumbuhan ekonomi akan sebesar 7.25 persen Mendukung studi Mauro (1995), studi empirik runtun waktu dari 1949-1989 yang dilakukan oleh Brixíová dan Bulí (2001) menunjukkan bahwa pada negara yang sangat rentan terhadap korupsi, yaitu negara yang menerapkan *bureaucratic economic system*, memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun. Lebih dari itu penyelidikan untuk kasus India, keberadaan undang-undang dan institusi anti korupsi telah mengurangi korupsi hingga 18,5 persen, sehingga memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonominya (Bhattacharyya dan Jha, 2009).

Dari sisi Pengeluaran Pemerintah, Tanzi dan Davoodi (1997) melakukan studi yang sistematis terhadap dampak korupsi terhadap keuangan publik. Terdapat beberapa temuan penting dari hasil studi tersebut, yaitu (a) korupsi memiliki kecenderungan untuk meningkatkan ukuran *public investment*, sebab pengeluaran publik meningkat karena praktek manipulasi yang dilakukan oleh pejabat tinggi, (b) korupsi akan mampu mengubah komposisi pengeluaran pemerintah dari pengeluaran yang bersifat pengoperasian dan pemeliharaan menjadi pengeluaran yang bersifat pembelian barang-barang baru, (c) korupsi memiliki kemungkinan untuk membelokkan komposisi pengeluaran publik dari pengeluaran untuk proyek-proyek publik ke aktifitas pembangunan yang tidak langsung terkait dengan publik dengan alasan proyek yang terkait langsung dengan masyarakat relatif lebih sulit untuk menerapkan rente. (d) korupsi akan mengurangi produktifitas investasi publik dan infrastruktur, (e) korupsi akan menurunkan penerimaan pajak sebab kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak dan tarif, secara riil sangat tergantung pada *nominal tax rate* dan rumitnya peraturan perpajakan yang pada akhirnya akan disederhanakan oleh petugas pajak dilapangan.

III. Modal Sosial Negara: Solusi Heterodox Korupsi?

Seperti uraian diatas, korupsi memang merupakan persoalan yang *multi-facet*. Seseorang dapat saja berpendapat, praktek korupsi membuat mereka lebih baik secara ekonomi, namun dampak korupsi secara keseluruhan terhadap pembangunan ekonomi

Daftar Pustaka

- Ackerman Susan Rose. 1975. *The Economics of Corruption*. Journal of Political Economy, Vol. IV, 1975.
- Arif, Sritua. 1995. *Dialektika Hubungan Ekonomi Indonesia dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. KELOLA. No. 10/1 V.
- Bhattacharyya, S and Jha, 2009. *Economic Growth, Law and Corruption: Evidence from India*, ASARC Working Papers 2009-15, Australian National University, Australia South Asia Research Centre.
- Brixiová, Z., and A. Bulíř, 2001, *Growth Slowdown in Bureaucratic Economic Systems: An Issue Revisited*, IMF Working Paper, WP/01/6.
- Chetwynd et al. 2003. *Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature*, Management Systems International.
- Khan, M.Q., 1998, *Patron-Client Networks and the Economic Effects of Corruption in Asia*, The European Journal of Development Research, Vol. 10 No. 1 (June): 15-39.
- Krueger. 1974. *The Political Economy of the Rent-Seeking Society*. American Economic Review Vol. 64 No. 3, 1974, p. 291-303.
- Lambsdorff, J.G., 2000, *Background Paper to the 2000 Corruption Perceptions Index: Frame Work Document*, <http://www.ifs.univie.ac.at/~uncjin/wcs.html>.
- Lambsdorff, 2006. *Measuring Corruption, The Validity and Precision of Subjective Indicator*, dalam Stanford, et. al., 2006, *Measuring Corruption*, Asghate Publishing.
- Lien, D.H.D., 1986, *A Note on Competitive Bribery Games*, Economic Letters, Vol. 22 No.4: 337-341.
- Lui, F., 1985, *An Equilibrium Queuing Model of Bribery*, Journal of Political Economy, Vol. 93 No. 4 (August): 760-781.
- Lui, F., 1996, *Three Aspects of Corruption*, Contemporary Economic Policy, Vol. 14 (July): 26-29.
- Mauro, P., 1995, *Corruption and Growth*, The Quaterly Journal of Economics (August): 681-711.
- Nusantara, Agung. 2001. *Dampak Korupsi terhadap Ekonomi*, Kertas Kerja PPES Vol II, Jember.
- Onyx, J. 1996. *The Measure of Social Capital, paper presented to Australian and New Zealand Third Sector Research Conference on Social Cohesion, Justice and Citizenship*, Victoria University dalam Suharto, tanpa tahun, Modal Sosial dan Kebijakan Publik.
- Shleifer, A., and R.W. Vishny, 1993, *Corruption*, The Quaterly Journal of Economics (August): 599-617.